



Pemerintah Kota Surakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA TAHUN 2025-2029



bakesbangpol@surakarta.go.id



[@bakesbangpolsolo](https://www.instagram.com/bakesbangpolsolo)



Gd. Tawang Praja Lt.4 Balaikota
Surakarta



KATA PENGANTAR

Sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi menjadi sebuah keharusan agar sejalan dengan arah kebijakan nasional, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025–2029, guna menjamin keterpaduan perencanaan dalam kerangka sistem pembangunan nasional.

Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, khususnya dalam mendukung terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia), maka diperlukan penguatan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta peningkatan peran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di samping itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, baik melalui evaluasi pelaksanaan Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Dengan disusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja pembangunan daerah.

Surakarta, Juli 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Surakarta



Indradi, AP,SH,MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19750718 199412 1 001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-4
1.3 Maksud dan Tujuan	1-8
1.4 Sistematika Penulisan	1-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA.....	II
2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol	2-1
a. Tugas Fungsi dan Struktur Badan Kesbangpol	2-1
b. Sumber Daya Badan Kesbangpol	2-5
c. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol	2-8
d. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesbangpol	2-15
e. Mitra Badan Kesbangpol dalam Pemberian Layanan.....	2-15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	2-16
a. Permasalahan pelayanan Badan Kesbangpol	2-16
b. Isu Strategis Badan Kesbangpol	2-18
BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III
3.1 Tujuan Renstra Badan Kesbangpol Kota Surakarta Tahun 2025-2029	3-1
3.2 Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kota Surakarta Tahun 2025-2029	3-2
3.3 Strategi Badan Kesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025 - 2029	3-8
3.4 Arah Kebijakan Badan Kesbangpol	3-9
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	4-1
4.2 Uraian keterkaitan NSPK<Sasaran RPJMD, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	4-4
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	4-23
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Pembangunan Daerah	4-37
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui IKU Badan Kesbangpol 2025-2029.....	4-38



BAB V PENUTUP	V
5.1 Kesimpulan Substansial.....	5-1
5.2 Kesimpulan sesuai Kaidah Pelaksanaan	5-1
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan	5-2
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025	2-6
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025	2-7
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2025	2-7
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2021-2024	2-12
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2021-2024	2-13
Tabel 2.6 Tabel Identifikasi Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2021-2024.....	2-17
Tabel 2.7 Perumusan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029	2-19
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029	3-3
Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.....	3-12
Tabel 4.1 Keterkaitan NSPK, Sasaran RPJMD, Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029	4-5
Tabel 4.2 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.....	4-23
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	4-37
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029	4-38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	1-3
Gambar 1.2 Diagram Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra	1-4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bngsa dan Politik.....	2-5
Gambar 2.2 Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Th 2022-2024.....	2-8
Gambar 2.3 Persentase Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pilkada.....	2-9
Gambar 2.4 Cakupan penyuluhan P4GN bagi generasi muda.....	2-10
Gambar 2.5 Jumlah ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	2-11
Gambar 3.1 Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025 - 2029.....	3-5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan persatuan bangsa. Hal ini sejalan dan mendukung Asta Cita Presiden RI dalam memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Peran strategis yang dilakukan Badan Kesbangpol dalam mendukung asta cita tersebut meliputi pendidikan politik serta literasi kebangsaan berbasis komunitas mendorong budaya demokratis yang inklusif, kolaborasi dengan partai politik dan lembaga pendidikan dalam memperkuat etika budaya politik, penguatan karakter kebangsaan, pemberdayaan Ormas, pembinaan kerukunan umat beragama untuk memperkuat toleransi dan mencegah potensi konflik sosial..

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkontribusi besar dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagaman dan iklim demokrasi yang inklusif dalam rangka memastikan bahwa semua elemen masyarakat dapat hidup dalam kerukunan dan saling menghargai demi masa depan yang lebih baik. Guna mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur dengan merespon berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi melalui Rencana Strategis yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Kota Surakarta telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada tanggal 27 November 2024, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah terpilih juga sudah dilantik pada tanggal 10 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia secara serentak. Salah satu tanggungjawab penting bagi kepala daerah yang telah terpilih pada Pilkada adalah kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 bulan setelah dilantik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJMD memuat arah



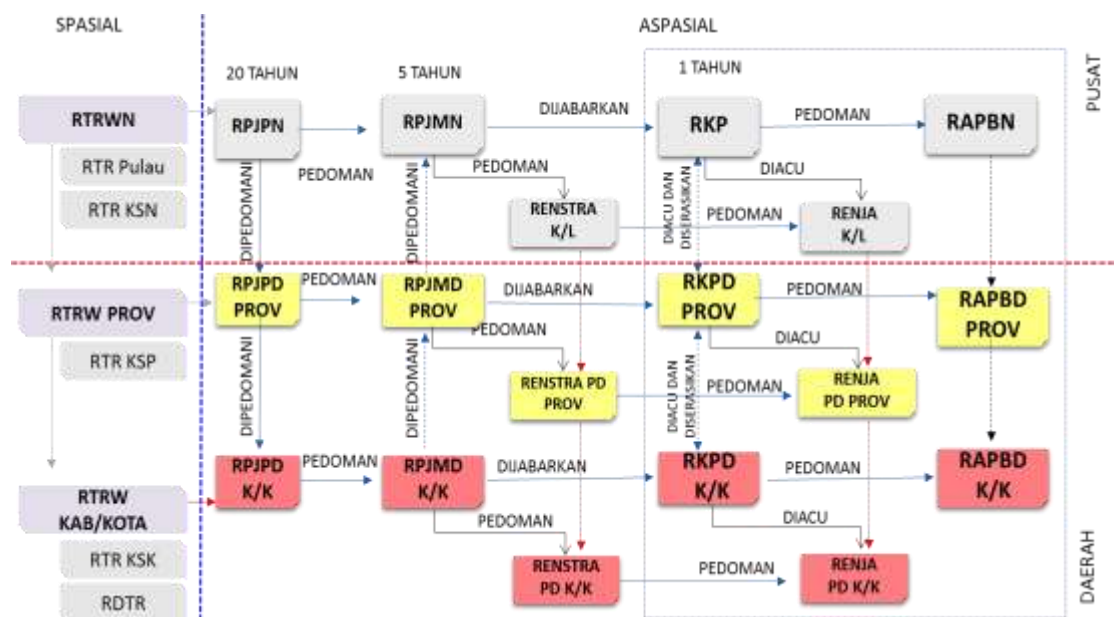
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya RPJMD tersebut akan dijabarkan lagi dalam dokumen operasional yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Perangkat Daerah. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Walikota Surakarta, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta harus menyusun Rencana strategis (Renstra).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, bahwa Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota.

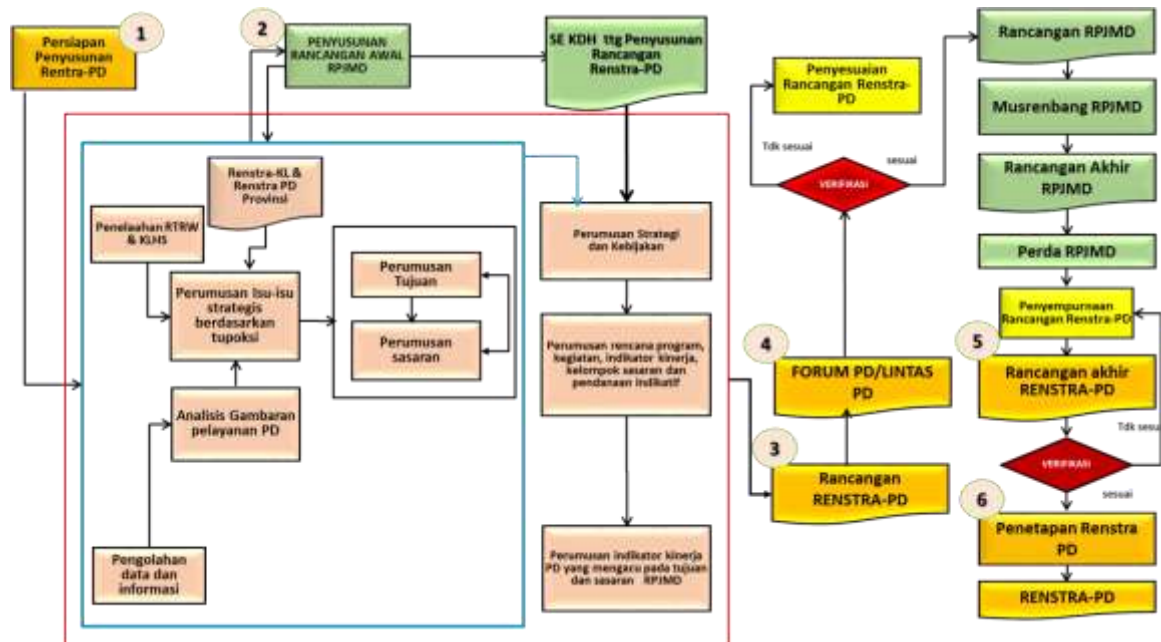
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kota Surakarta selain itu juga mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan juga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis. Selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta juga berpedoman pada dokumen RTRW Kota Surakarta dan juga dokumen KLHS. Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang sejenis dijadikan acuan untuk menyelaraskan indikator-indikator kinerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dokumen RTRW dan KLHS dijadikan pedoman supaya setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta tidak berpengaruh terhadap kondisi ruang dan lingkungan hidup Kota Surakarta.



Gambar 1.1 Diagram Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.



Gambar 1.2 Diagram Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029, dimana renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029. Selain itu Renstra ini juga akan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang



- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 6. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029
29. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta;



3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029;
4. Digunakan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab ini berisi uraian tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya Perangkat Daerah; kinerja pelayanan; kelompok sasaran layanan serta permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang uraian program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif serta target tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SURAKARTA

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tugas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan terkait kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

a). Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan Fungsi guna pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.



b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik pada Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;
- 3) Penyelenggaraan administrasi umum Badan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada Badan;
- 5) Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah lingkup Badan;
- 6) Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup Badan
- 7) Penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup Badan;
- 8) Penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 9) Penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian;
- 10) Penyelenggaraan kehumasan dan kerja sama;
- 11) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:

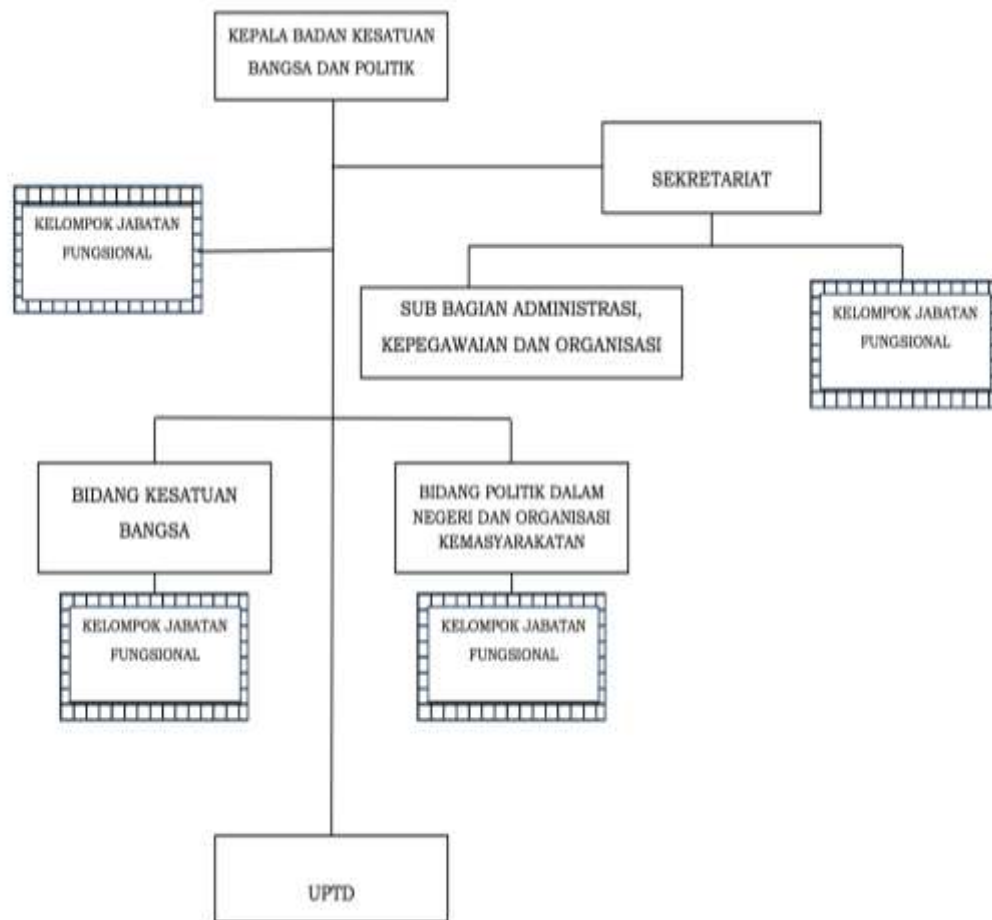
- 1) Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan



- bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - 3) Pengelolaan kegiatan terkait perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila, karakter kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - 4) Pengelolaan kegiatan terkait perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - 5) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - 6) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- d) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait politik dalam negeri, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:



- 1) Pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, serta perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- 2) Penyelenggaraan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, serta perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- 3) Pengelolaan kegiatan terkait perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
- 4) Penyusunan program kerja, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan dan koordinasi, serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- 5) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, serta perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- 6) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.



a) Sumber daya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta posisi per bulan Juni Tahun 2025 sebanyak 42 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 24 orang pegawai negeri sipil (PNS); 3 orang CPNS, 8 orang PPPK, 5 Non ASN dan 2 orang tenaga outsourcing. Dari 42 orang pegawai tersebut, sebanyak 29 orang laki-laki dan 13 orang perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SMA Sederajat	4	0	4
2	Diploma 3	2	3	5
3	Diploma 4	2	1	3
4	S1	18	6	24
5	S2	3	3	6
	Jumlah	29	13	42

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, pada tahun 2025, sebanyak 6 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana); 24 orang pegawai berpendidikan Strata 1 (Sarjana); 3 orang pegawai berpendidikan Diploma IV; 5 orang berpendidikan Diploma III dan 4 orang berpendidikan SMA.

Dirinci berdasarkan golongan, menunjukkan bahwa ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta sebagian besar didominasi oleh Golongan III sebanyak 12 orang, Golongan IV sebanyak 7 orang; Golongan II sebanyak 4 orang dan Non Golongan sebanyak 7 orang. Selengkapnya jumlah ASN berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Jabatan	PNS Golongan				PPPK Golongan			Non ASN TKPK	Jenis Kelamin	
		IV	III	II	I	IX	VII	VIII		L	P
1	Eselon II	1	-	-	-	-	-		-	1	0
2	Eselon III	3	-	-	-	-	-		-	1	2
3	Eselon IV	1	-	-	-	-	-		-	0	1
4	JF Penyetaraan	2	3	-	-	-	-		-	3	2
5	Jabfung/ PPPK	-	-	-	-	6	2	0	-	6	2
6.	CPNS		2	1						2	1
7.	Staf/ Pelaksana	-	15	3	-	-	-	-	5	15	5
8.	Outsourcing	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
	Jumlah	7	15	5	0	6	2	0	7	29	13

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, 2025

b) Sarana dan Prasarana (Asset)

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ditinjau dari dukungan sarana prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta didukung beberapa sarana prasarana sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2025

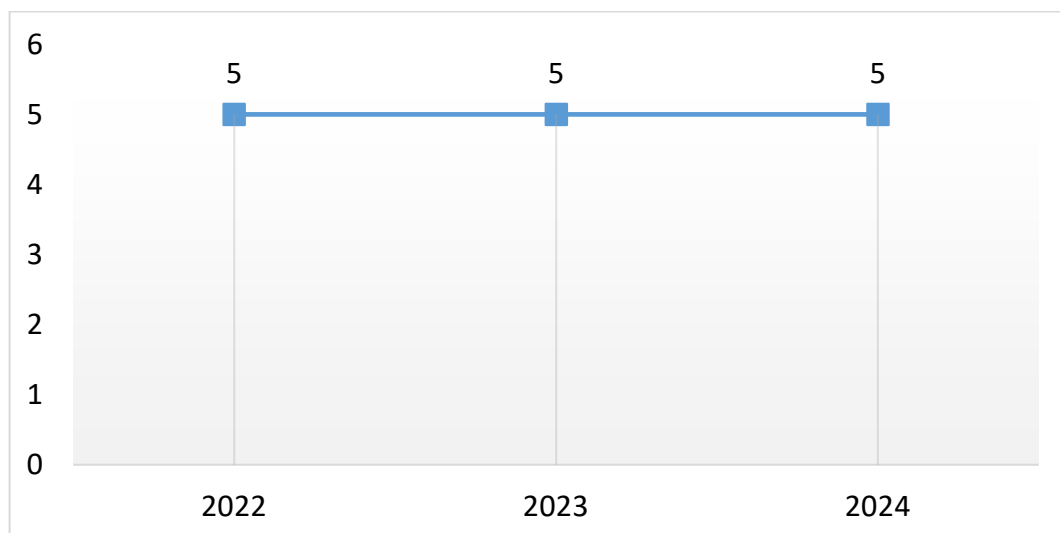
No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Pesawat Telepon	buah	Baik		1
2	Kamera Digital	buah	Baik		6
3	LCD Proyektor	unit	Baik		3
4	Komputer PC	buah	Baik		23
5	Laptop	buah	Baik		12
6	Printer	buah	Baik		32
7	Scan	buah	Baik		2
8	Camcoder	buah	Baik		0
9	Megapun	buah	Baik		4
10	Wireles	buah	Baik		3
11	UPS	buah	Baik		0
12	Termometer	buah	Baik		0
13	Kendaraan roda (4)	buah	Baik		4
14	Kendaraan roda (2)	buah	Baik		7

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, 2025



c. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

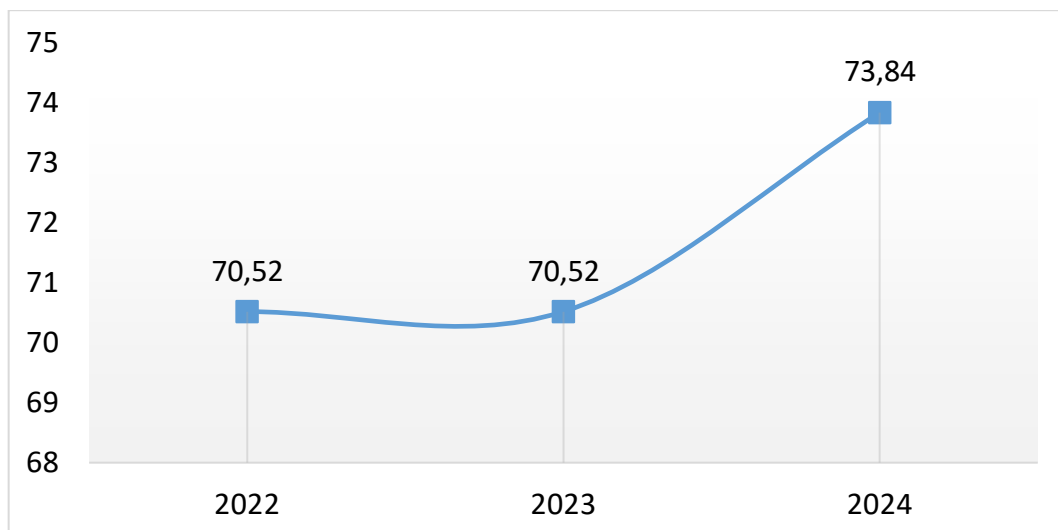
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kota Surakarta memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk membela negara, serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak-hak politik. Dalam rangka menciptakan kehidupan yang harmoni dan iklim yang demokratis, terjadi penurunan potensi kejadian konflik di berbagai aspek seperti sosial, budaya, ideologi, politik, dan ekonomi, termasuk unjuk rasa, isu SARA. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan berbagai langkah strategis yang bersifat responsif dan preventif seperti peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan kewaspadaan dini di masyarakat, fasilitasi dialog antar kelompok masyarakat dan tokoh agama, pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan serta penguatan peran Forum Pimpinan Daerah. Berdasarkan data capaian kinerja, persentase penurunan potensi kejadian konflik pada tahun 2022 hingga 2024 tercatat sebesar 5%, yang menunjukkan tren positif dalam upaya menciptakan situasi yang kondusif serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.



Gambar 2.2 Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran) Tahun 2022-2024

Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan indikator penting dalam mengukur partisipasi politik masyarakat dan kualitas demokrasi di tingkat daerah. Tingginya partisipasi pemilih mencerminkan

kesadaran warga negara terhadap pentingnya peran mereka dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, melalui fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik dan Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas. Partisipasi yang aktif diharapkan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang aspiratif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan data capaian, persentase pemilih yang menggunakan hak pilih pada tahun 2022 mencapai 70,00%, dan mengalami peningkatan menjadi 73,84% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan tren positif dalam kesadaran demokrasi masyarakat.



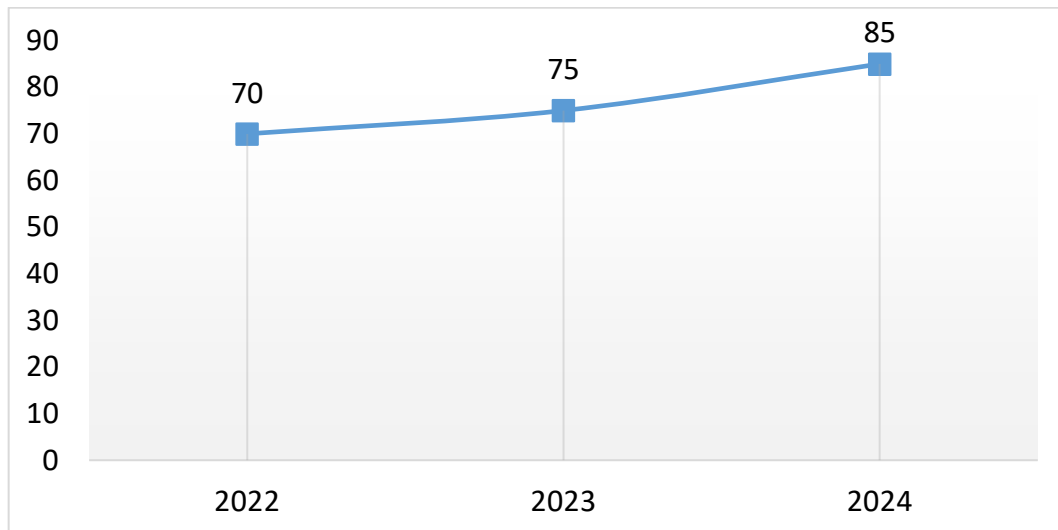
Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 2.3 Persentase pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022-2024

Dalam upaya memperkuat ketahanan sosial generasi muda, cakupan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada pelajar juga menjadi perhatian penting. Penyuluhan bertujuan untuk menanamkan kesadaran sejak dini mengenai bahaya narkoba serta membentuk karakter generasi muda yang sehat, produktif, dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Meningkatnya cakupan penyuluhan P4GN di kalangan pelajar merupakan bagian integral dari pembinaan wawasan kebangsaan dan penguatan nilai-nilai kebhinekaan. Berdasarkan data capaian, cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda



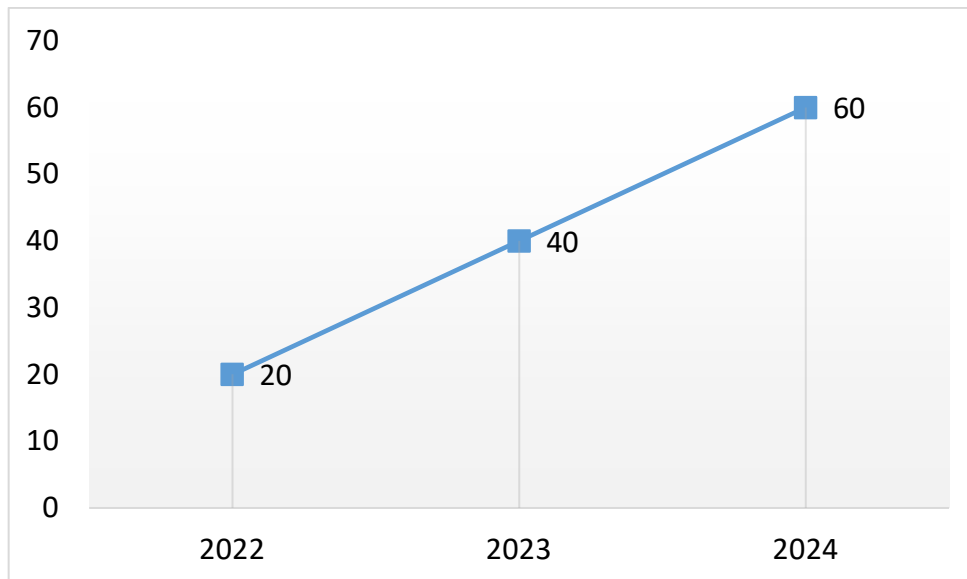
(pelajar) mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu dari 70% pada tahun 2020 menjadi 85% pada tahun 2024. Tren positif ini mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan karakter dan kesadaran akan pentingnya hidup bebas narkoba di kalangan pelajar.



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 2.4 Cakupan Penyuluhan P4GN Pada Generasi Muda (Pelajar) Tahun 2022-2024

Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan juga mengalami perkembangan positif. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman Ormas, sehingga mampu menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Sepanjang tahun 2022 hingga 2024, jumlah Ormas yang menerima pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan terus meningkat. Pada tahun 2022, cakupan Ormas yang terlibat tercatat sebesar 20%, dan meningkat signifikan menjadi 60% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepedulian dan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis,



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 2.5 Jumlah Ormas Yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tahun 2022-2024

Selengkapnya, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	Persen		5	5	5	5	5		5	5	5		100	100	100
Persentase Konflik Sosial yang ditangani	Persen		100	100	100	100	100		100	100	100		100	100	100
Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan kepala daerah	Persen		70	70	70	70	70		70,52	70,52	73,84		100	100,74	105,49
Nilai PMPRB	Nilai		24,88	25,38	25,88	26,38	26,88		30,95	30,95			80,39	121,95	
Nilai Maturitas Kelembagaan	Nilai		38	39	39	40	40				52		100	102,56	133,33
Jumlah Ormas yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Persen		20	40	60	80	100		20	40	60		100	100	100
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	Persen		51,43	52,86	54,29	55,72	57,15		52,00	63,21	91,28		100	119,58	168,13
Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda (pelajar)	Persen		70	75	85	90	90		70	75	85		100	100	117,65
Persentase Potensi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi yang ditangani	Persen		100	100	100	100	100		100	100	100		100	100	100
Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	Persen		35	35	35	35	35		35,08	35,08	35,09		100	100,23	100,26
Nilai Sakip	Nilai		66,3	66,8	67,3	67,8	68,3		71,66	76,70	77,71		100	106,96	114,48
Nilai SKM	Nilai		87,69	87,99	88,29	88,59	88,89			91,52	94,93		100	104,01	107,52



Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai SPIP	Nilai		1,999	2,001	2,003	2,005	2,007		2,23	3,926	4,13		100	110,95	203,55

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dalam mendukung capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, alokasi anggaran dan realisasi pendanaan menjadi faktor penting yang mencerminkan komitmen serta efektivitas pelaksanaan program-program strategis. Berikut disajikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hingga tahun 2024, pada masa periode tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2021-2024

Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		204.950.000	217.247.000	230.281.820	244.098.729	258.744.653		418.883.700	693.601.300	1.594.917.280		204,38	319,27	692,59
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100.000.000	106.000.000	112.360.000	119.101.600	126.247.696		89.187.000	160.163.000	212.970.760		89,19	151,10	189,54
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		200.000.000	212.000.000	224.720.000	238.203.200	252.495.392		236.103.700	259.503.150	268.355.000		118,05	122,40	119,42



Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		100.000.000	106.000.000	112.360.000	119.101.600	126.247.696		804.350.500	702.178.350	439.229.800		804,35	662,43	390,91
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		1.099.500.000	1.165.470.000	1.235.398.200	1.309.522.092	1.388.093.418		1.060.667.720	16.748.520.720	27.653.985.987		96,47	1437,06	2238,47
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		5.910.013.220	6.808.923.922	7.931.315.150	8.461.907.148	9.173.051.248		3.853.954.494	4.342.089.201	5.308.372.608		65,21	63,77	66,93

Sumber : Hasil Analisis, 2025



d. Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Surakarta

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta kelompok sasaran layanan antara lain sebagai berikut:

- a. Organisasi Masyarakat;
- b. Partai Politik;
- c. Forum Pembauran Kebangsaan;
- d. Forum Komunikasi Umat Beragama;
- e. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- f. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
- g. Pemberian rekomendasi surat keterangan penelitian (mahasiswa, akademisi, swasta dan masyarakat)

e. Mitra Badan Kesbangpol dalam pemberian pelayanan

dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin koordinasi dan bersinergi dengan stakeholder terkait seperti:

- a. Forum Pembauran Kebangsaan
- b. Forum Komunikasi Umat Beragama
- c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
- d. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
- e. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta
- f. Kementerian Agama Wilayah Surakarta
- g. DPRD Kota Surakarta;
- h. Kepolisian Resort Kota Surakarta;
- i. Komando Distrik Militer 0735 Kota Surakarta.
- j. Kejaksaan Negeri Kota Surakarta
- k. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
- l. Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta
- m. Dinas/ Instansi horisontal dan Vertikal.



2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang perlu diidentifikasi secara cermat. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan. Adapun permasalahan yang berhasil diidentifikasi antara lain sebagai berikut:



Tabel 2.6

Tabel Identifikasi Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rentannya stabilitas sosial dan politik daerah	• Meningkatnya potensi konflik berbasis SARA dan politik identitas. • Lemahnya deteksi dini terhadap dinamika sosial yang mengarah pada konflik. • Masih adanya praktik intoleransi di masyarakat	• Terbatasnya kapasitas dan koordinasi antar lembaga deteksi dini (FKDM, FKUB, dll). • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai kebhinekaan dan toleransi. • Masih terbatasnya ruang dialog antar kelompok yang berbeda latar belakang. • Belum optimalnya sistem pelaporan dan penanganan konflik secara partisipatif.
Belum optimalnya partisipasi politik kelompok rentan dan masyarakat umum	• Terbatasnya keterlibatan perempuan, pemuda, disabilitas, dan kelompok marjinal dalam proses politik. • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak politik secara kritis dan bertanggung jawab.	• Pendidikan politik masih bersifat seremonial dan belum kontekstual. • Kurangnya regulasi afirmatif atau fasilitasi khusus bagi kelompok rentan. • Belum meratanya akses informasi politik yang mudah dipahami masyarakat akar rumput. • Budaya apatis politik di kalangan muda karena kurangnya saluran ekspresi yang positif.
Masih lemahnya wawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi Pancasila	• Menurunnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. • Meningkatnya paparan ideologi transnasional dan radikalisme di ruang digital. • Kurangnya penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	• Program pembinaan ideologi belum berkelanjutan dan tidak adaptif dengan generasi muda; • Lemahnya pengawasan dan edukasi terhadap konten radikal/intoleran di media sosial; • Kurangnya integrasi nilai kebangsaan dalam kegiatan budaya, pendidikan, dan sosial masyarakat.

Sumber : Hasil Analisis, 2025



b. Isu strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama atau tantangan penting yang bersifat mendasar, berpengaruh luas, dan berpotensi besar memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis muncul dari hasil analisis terhadap kondisi aktual, tren perkembangan ke depan, tuntutan masyarakat, perubahan kebijakan nasional maupun global, serta dinamika lingkungan strategis lainnya. Isu ini menuntut perhatian dan penanganan secara prioritas karena berhubungan erat dengan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, identifikasi isu strategis menjadi langkah krusial untuk menentukan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang tepat dan efektif. Dengan mengenali isu strategis secara tepat, Perangkat Daerah dapat merancang intervensi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan aktual, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.



Tabel 2.7
Perumusan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional Jawa Tengah	
• Nilai-nilai budaya Jawa yang menjunjung tinggi tepa selira, gotong royong, dan toleransi menjadi modal sosial penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; • Terdapat banyak organisasi kemasyarakatan, LSM, serta organisasi kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna, dan Pramuka yang berperan aktif dalam pembangunan sosial-politik, pembinaan ideologi Pancasila, dan pelestarian nilai-nilai kebangsaan; • Budaya lokal seperti wayang, keraton, batik, dan upacara adat mengandung nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi sarana edukasi kebangsaan dan penguatan identitas nasional; • Kota Surakarta memiliki banyak institusi pendidikan dari berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi seperti UNS dan ISI	• Masih rentannya stabilitas sosial dan politik daerah; • Belum optimalnya partisipasi politik kelompok rentan dan masyarakat umum; • Masih lemahnya wawasan kebangsaan dan ketahanan ideologi Pancasila	• Meningkatnya polarisasi politik dan intoleransi di ruang digital; • Ancaman ideologi transnasional yang memicu radikalisme dan ekstremisme; • Peningkatan disinformasi dan propaganda digital yang mengancam demokrasi	• Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik dan demokrasi. • Tingginya potensi konflik menjelang Pemilu serentak (2024 dan 2029). • Rendahnya partisipasi politik kelompok rentan (perempuan, pemuda, disabilitas). • Peningkatan tensi politik identitas dan isu SARA dalam kontestasi politik.	• Masih terdapat kantong intoleransi di beberapa wilayah Jawa Tengah. • Belum meratanya pendidikan politik dan wawasan kebangsaan di tingkat desa/kelurahan. • Tantangan menjaga kerukunan di tengah keberagaman budaya dan agama.	• Belum optimalnya sistem deteksi dini konflik sosial di tingkat kelurahan/kecamatan. • Kurangnya inovasi program pendidikan politik dan wawasan kebangsaan berbasis komunitas dan responsif GEDSI. • Partisipasi politik masyarakat belum merata, terutama dari kelompok pemuda dan marginal. • Kelembagaan FKDM, FKUB, dan ormas belum sepenuhnya terintegrasi dan difungsikan secara maksimal • Peran Kesbangpol belum dikenal luas sebagai motor penguatan demokrasi dan stabilitas sosial.



Potensi Daerah	Permasalahan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional Jawa Tengah	
Surakarta yang dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan kajian kebangsaan, demokrasi, dan politik lokal. - Kondisi politik lokal yang relatif stabil, partisipasi politik masyarakat yang baik, serta sinergi antara pemerintah daerah dan Forkopimda menjadi landasan kuat dalam menjaga ketahanan politik dan memperkuat wawasan kebangsaan. - Tersedianya berbagai saluran komunikasi seperti media cetak, radio komunitas, media daring, dan forum dialog publik menjadi sarana efektif untuk menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan partisipasi politik yang sehat.					

Sumber : Hasil Analisis, 2025



BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Kesbangpol Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Visi Walikota Surakarta yang terpilih periode 2025-2029 adalah **“Gotong Royong Mewujudkan Surakarta yang Berbudaya Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, didukung oleh lima misi yaitu:

1. Misi 1: Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan sosial untuk semua
2. Misi 2: Berbudaya untuk Kemajuan dan Ketahanan sosial
3. Misi 3: Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan
4. Misi 4: Inovasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif
5. Misi 5: Ketahanan Kota dan Kerja sama Antarwilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkontribusi pada ketercapaian Misi ke-lima yaitu: **Ketahanan Kota dan Kerjasama Antar Wilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan**. Pada misi kelima, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkontribusi pada pencapaian sasaran ke-7, yaitu: Meningkatnya ketahanan pangan dan ketahanan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan.

Tujuan merupakan implementasi dari misi organisasi dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Tujuan berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan arah pembangunan dalam jangka menengah, yaitu selama lima tahun. Tujuan disusun dengan berlandaskan visi dan misi serta mempertimbangkan hasil analisis strategis terhadap isu-isu utama. Meskipun tidak selalu dinyatakan secara kuantitatif, tujuan harus mencerminkan kondisi ideal yang menjadi sasaran di masa depan.

Tujuan ini kemudian menjadi dasar dalam merumuskan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan untuk merealisasikan misi. Dengan mengacu pada kerangka misi yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta merumuskan tujuan dan sasaran strategisnya



sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Renstra juga ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah serta mengacu pada sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta untuk tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah: **Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia (HAM)** dengan indikator: Indeks Harmoni Indonesia. Untuk target/ baseline Indeks Harmoni tahun 2025 belum diketahui datanya karena data tahun 2025 tidak dipublish oleh Kementerian Dalam Negeri akibat kurangnya respondes saat dilakukan survei pengukuran Indeks Harmoni.

3.2 Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran terukur dari tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran jangka menengah yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota adalah :

1. Menguatnya Harmoni Keberagaman dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Menguatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis;
3. Meningkatnya efektivitas tata kelola organisasi Perangkat Daerah .

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta sebagaimana dalam tabel 3.1.



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029

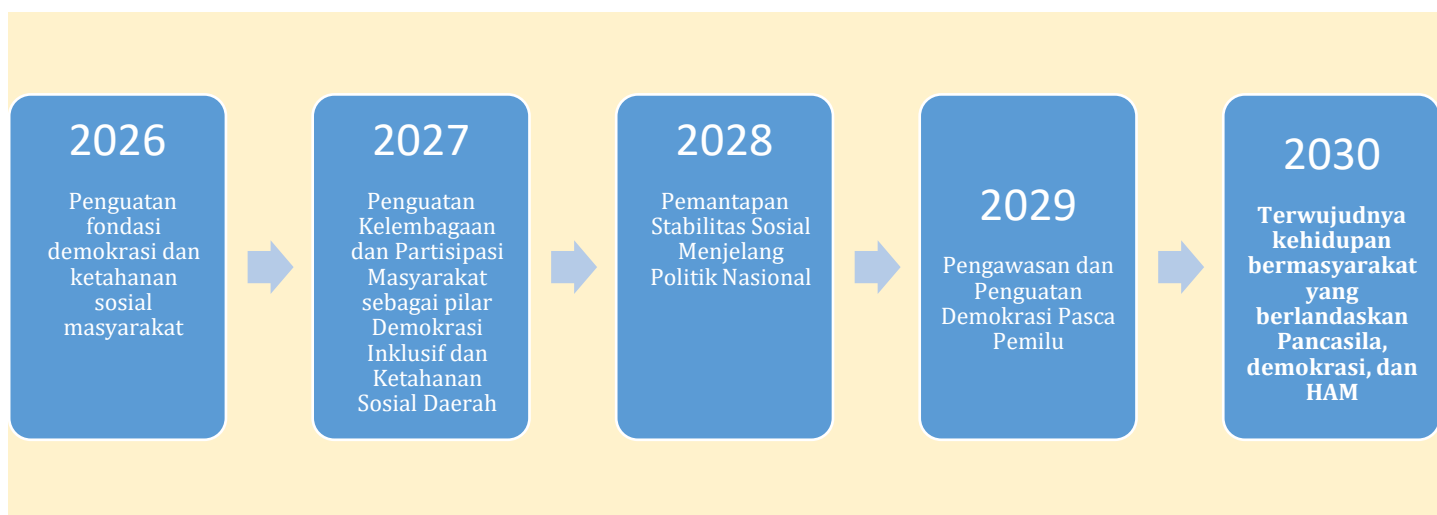
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12
	Tujuan: Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Indeks Harmoni	Nilai	n/a	n/a	5,70	5,80	5,90	6,00	
	Sasaran 1: Meningkatnya harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah kejadian konflik SARA	kejadian	0	0	0	0	0	0	
	Sasaran 2: Meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik	persen	70	70	70	70	75	75	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	5	8	9	10	11	12
	Sasaran 3: Meningkatnya efektivitas tata kelola organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai indeks	40	49	49	49	50	50	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Agenda pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dibagi dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar dalam menyusun target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat lebih realistis dan dapat terlihat ukuran capaian setiap periodenya. Selain itu, tahapan disusun agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya (anggaran, SDM dan sarana prasarana penunjang) yang terbatas, sehingga perlu prioritas bertahap, bukan sekaligus. Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 3.1 Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029

1. Tahun 2026: Penguatan Fondasi Demokrasi dan Ketahanan Sosial Masyarakat

Pada tahun 2026, penguatan fondasi demokrasi dan ketahanan sosial masyarakat difokuskan pada pemetaan sosial politik, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penguatan peran ormas dan forum kewaspadaan sosial. Dilakukan pembaruan data dan pemetaan terhadap keberadaan dan aktivitas ormas dan partai politik sebagai dasar pembinaan dan pengawasan. Pendidikan politik dilakukan secara partisipatif melalui pelibatan ormas, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Pemerintah daerah juga memfasilitasi dialog kebangsaan dan forum aspirasi masyarakat sebagai



upaya menjaga kerukunan dan memperkuat partisipasi warga dalam proses demokrasi. Di sisi lain, sistem deteksi dan respon dini terhadap potensi konflik diperkuat dengan pelibatan jejaring masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Seluruh kegiatan dimonitor secara berkala untuk menjamin efektivitas dan perbaikan berkelanjutan.

2. Tahun 2027: Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Pilar Demokrasi Inklusif dan Ketahanan Sosial Daerah

Pada tahun 2027, fokus diarahkan pada konsolidasi hasil kegiatan tahun sebelumnya, perluasan jangkauan program ke wilayah yang lebih luas, serta penguatan kelembagaan masyarakat dan forum-forum strategis. Kegiatan diarahkan untuk memperkuat peran ormas dan partai politik dalam menjaga stabilitas sosial dan demokrasi melalui pelatihan lanjutan, fasilitasi kegiatan kebangsaan, serta pendampingan berbasis wilayah. Pembaruan dan validasi data ormas dan parpol terus dilanjutkan secara digital dan terintegrasi untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan. Forum-forum seperti FKDM, FKUB, dan FPK diperkuat kelembagaan dan sumber dayanya agar lebih responsif terhadap isu-isu sosial politik lokal. Pendidikan politik mulai difokuskan pada pelibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi substansial, seperti pengawasan pemilu, advokasi kebijakan publik, serta penguatan kapasitas perempuan dalam pencalonan legislatif guna mendorong keterwakilan 30% perempuan. Kesiapsiagaan sosial ditingkatkan melalui pelatihan respon cepat komunitas dan penyusunan rencana kontinjensi konflik sosial berbasis daerah. Di akhir tahun, dilaksanakan evaluasi menyeluruh untuk menilai kesiapan masuk ke tahap penguatan jangka panjang di tahun berikutnya.

3. Tahun 2028: Pemantapan Stabilitas Sosial Menjelang Politik Nasional

Tahun 2028 menjadi fase strategis dalam menjaga soliditas dan kohesi sosial masyarakat menjelang momentum politik nasional, termasuk Pemilu dan Pilkada serentak. Fokus diarahkan pada pemantapan stabilitas sosial melalui penguatan jejaring kewaspadaan dini, intensifikasi dialog antar kelompok masyarakat, serta pelibatan aktif elemen masyarakat sipil dalam menjaga ruang demokrasi yang damai dan tertib.



Kelembagaan forum seperti FKDM, FKUB, dan FPK diperkuat dalam hal koordinasi, sumber daya, dan kapasitas deteksi-respons isu sosial politik lokal. Sementara itu, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik difokuskan pada peningkatan kedewasaan berdemokrasi, termasuk peneguhan komitmen terhadap nilai kebangsaan, toleransi, dan anti-politik identitas.

Pendidikan politik difokuskan pada penguatan peran pemilih cerdas, terutama kelompok pemuda dan perempuan, dalam menjaga kualitas demokrasi substansial. Pelatihan mitigasi konflik sosial, literasi digital, serta kampanye anti-hoaks dan ujaran kebencian juga diintensifkan.

Keseluruhan upaya ini diarahkan untuk memastikan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga, serta terciptanya iklim politik yang sehat, inklusif, dan konstruktif menjelang kontestasi politik nasional.

4. Tahun 2029: Pengawasan dan Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu

Tahun 2029 menjadi momentum konsolidasi demokrasi setelah berlangsungnya Pemilu dan Pilkada serentak. Fokus diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan partisipatif, pemulihan kohesi sosial pasca kontestasi politik, serta penguatan kelembagaan dan budaya demokrasi yang berkelanjutan.

Program diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, media, serta kelompok strategis dalam melakukan pemantauan terhadap implementasi janji politik, kinerja wakil rakyat, dan keberlanjutan kebijakan publik. Di saat yang sama, fasilitasi dialog antar kelompok masyarakat dan aktor politik difokuskan untuk membangun rekonsiliasi sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Partai politik dan ormas didorong untuk memperkuat fungsi edukasi politik dan kaderisasi secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu. Selain itu, dilakukan pembaruan regulasi internal dan kode etik kelembagaan guna memastikan tata kelola demokrasi yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Pendidikan politik pasca pemilu difokuskan pada penguatan literasi demokrasi, advokasi kebijakan publik, serta penguatan kapasitas



masyarakat dalam mengawal pembangunan yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.

5. Tahun 2030: Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM

Tahun 2030 menjadi tonggak konsolidasi akhir dari upaya jangka menengah dalam membangun masyarakat yang berkarakter, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Fokus diarahkan pada pelebagaan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kegiatan diarahkan pada pengarusutamaan pendidikan nilai kebangsaan, peningkatan literasi demokrasi dan HAM, serta integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam program kelembagaan masyarakat, ormas, partai politik, dan institusi pemerintahan daerah. Forum-forum strategis seperti FKUB, FKDM, dan FPK difungsikan sebagai simpul sosial yang aktif dalam memperkuat dialog, toleransi, serta penanggulangan potensi konflik berbasis nilai kemanusiaan dan kebhinekaan.

Partisipasi publik tidak hanya difokuskan pada aspek politik elektoral, tetapi juga pada keterlibatan dalam perumusan kebijakan, advokasi isu-isu HAM, serta pengawasan terhadap layanan publik yang adil dan setara.

Pada tahap ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem, tetapi sebagai budaya yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Ketahanan sosial politik daerah diharapkan terbentuk secara berkelanjutan, didukung oleh kesadaran kolektif atas pentingnya nilai Pancasila, demokrasi substansial, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara.

3.3 Strategi Badan Kesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029

Analisis lingkungan internal dan eksternal memiliki peran penting dalam perencanaan strategis, karena memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dari hasil analisis ini, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan atau



sasaran dituangkan dalam kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran kelembagaan, meningkatkan efektivitas program, serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Berikut adalah strategi untuk Mewujudkan **Kehidupan Bermasyarakat Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM di Kota Surakarta** adalah sebagai berikut:

1. Penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila;
2. Peningkatkan sinergitas dan koordinasi forum kerukunan antar umat beragama dengan stakeholder terkait
3. Peningkatan kapasitas deteksi dini dan kewaspadaan dini;
4. Penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan;
5. Peningkatan pendidikan politik masyarakat secara partisipatif dan inklusif yang responsif gender dan GEDSI;
6. Penguatan sistem manajemen kinerja dan tata kelola internal yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

3.4 Arah kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaan strategi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil terarah dan konsisten dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan ini memberikan panduan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, agar setiap langkah strategis yang diambil dapat mendukung visi pembangunan daerah secara efektif. Perumusan arah kebijakan pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dengan memperhatikan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta. Rumusan arah kebijakan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:



1. Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan yang responsif gender;
2. Membentuk dan membina kader wawasan kebangsaan sebagai agen perubahan di tingkat komunitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan;
3. Melakukan kampanye Pancasila dan kebhinekaan secara massif melalui media cetak maupun media sosial;
4. Mengajak tokoh masyarakat dan influencer lokal untuk menjadi duta toleransi;
5. Mengoptimalkan peran forum-forum binaan seperti FKDM, FKUB, dan FPK dalam menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan toleransi di masyarakat;
6. Menyelenggarakan dialog antar kelompok masyarakat untuk mempererat silaturahmi lintas suku, agama, dan golongan;
7. Memperkuat koordinasi Kesbangpol dengan Forkopimda, aparat keamanan, tokoh agama, dan ormas dalam pencegahan konflik;
8. Melakukan pemetaan wilayah rawan konflik dan menyusun rencana kontingensi;
9. Mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan isu-isu sensitif (radikalisme, intoleransi, potensi konflik horizontal) berbasis teknologi informasi;
10. Melakukan deteksi dini dan langkah preventif terhadap berkembangnya paham anti-Pancasila, radikalisme, separatisme, dan gerakan intoleran.
11. Meningkatkan kapasitas anggota FKDM dan stakeholder terkait agar mampu mengidentifikasi dan analisis dini terhadap indikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, radikalisme, maupun disintegrasi bangsa;
12. Menyelenggarakan pelatihan manajemen organisasi, pemahaman hukum, dan wawasan kebangsaan bagi pengurus ormas;
13. Mendorong ormas menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, demokrasi, dan kerukunan;



14. Memperbarui database ormas secara berkala melalui sistem informasi ormas;
15. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas ormas agar tetap sesuai dengan prinsip konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan etika berorganisasi;
16. Membangun komunikasi dan kolaborasi antara ormas, FKUB, FPK, FKDM, serta lembaga-lembaga terkait dalam merumuskan dan melaksanakan program pembinaan masyarakat;
17. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran politik dasar kepada masyarakat, khususnya kelompok pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya;
18. Melakukan pendidikan politik khusus bagi perempuan agar lebih siap menjadi calon legislatif maupun pemimpin komunitas;
19. Berkolaborasi dengan organisasi perempuan dan KPU untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan politik perempuan;
20. Mendorong partai politik agar mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif secara proporsional dan kompetitif;
21. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN;
22. Penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbasis kinerja;
23. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan dan pengelolaan anggaran;
24. Mendorong budaya kerja kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Berikut tabel strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dikaitkan dengan visi, misi dan arah kebijakan RPJMD Kota Surakarta tahun 2025-2029:



Tabel 3.2

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan		
Misi RPJMD	Misi 5: Ketahanan Kota dan Kerjasama Antar Wilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan		
Operasionalisasi NSPK	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kesbangpol
	Penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila	• Meningkatkan sistem keamanan kota berbasis pemantauan digital dan respons cepat, serta pelibatan masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan; • Perluasan edukasi kesadaran keamanan berbasis komunitas melalui kampanye digital • Replikasi praktik baik sistem keamanan komunitas yang berhasil ke seluruh kelurahan. • Penguatan regulasi dan SOP penanganan konflik sosial serta penegakan ketentraman yang responsif dan akuntabel.	• Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan; • Membentuk dan membina kader wawasan kebangsaan sebagai agen perubahan di tingkat komunitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; • Melakukan kampanye Pancasila dan kebhinekaan secara massif melalui media cetak maupun media sosial; • Mengajak tokoh masyarakat dan influencer lokal untuk menjadi duta toleransi.
	Peningkatkan sinergitas dan koordinasi forum kerukunan antar umat beragama dengan stakeholder terkait		• Mengoptimalkan peran forum-forum binaan seperti FKDM, FKUB, dan FPK dalam menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan toleransi di masyarakat; • Menyelenggarakan dialog antar kelompok masyarakat untuk mempererat silaturahmi lintas suku, agama, dan golongan; • Memperkuat koordinasi Kesbangpol dengan Forkopimda, aparat keamanan, tokoh agama, dan ormas dalam pencegahan konflik; • Melakukan pemetaan wilayah rawan konflik dan menyusun rencana kontingensi.



Visi RPJMD	Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan		
Misi RPJMD	Misi 5: Ketahanan Kota dan Kerjasama Antar Wilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan		
Operasionalisasi NSPK	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kesbangpol
	Peningkatan kapasitas deteksi dini dan kewaspadaan dini		• Mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan isu-isu sensitif (radikalisme, intoleransi, potensi konflik horizontal) berbasis teknologi informasi; • Melakukan deteksi dini dan langkah preventif terhadap berkembangnya paham anti-Pancasila, radikalisme, separatisme, dan gerakan intoleran. • Meningkatkan kapasitas anggota FKDM dan stakeholder terkait dalam agar mampu mengidentifikasi dan analisis dini terhadap indikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal, radikalisme, maupun disintegrasi bangsa
	Penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan		• Menyelenggarakan pelatihan manajemen organisasi, pemahaman hukum, dan wawasan kebangsaan bagi pengurus ormas; • Mendorong ormas menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, demokrasi, dan kerukunan; • Memperbarui database ormas secara berkala melalui sistem informasi ormas; • Menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas ormas agar tetap sesuai dengan prinsip konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan etika berorganisasi; • Membangun komunikasi dan kolaborasi antara ormas, FKUB, FPK, FKDM, serta lembaga-



Visi RPJMD	Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan		
Misi RPJMD	Misi 5: Ketahanan Kota dan Kerjasama Antar Wilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan		
Operasionalisasi NSPK	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kesbangpol
			lembaga terkait dalam merumuskan dan melaksanakan program pembinaan masyarakat.
	Peningkatan pendidikan politik masyarakat secara partisipatif dan inklusif		• Melakukan sosialisasi dan pembelajaran politik dasar kepada masyarakat, khususnya kelompok pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya; • Melakukan pendidikan politik khusus bagi perempuan agar lebih siap menjadi calon legislatif maupun pemimpin komunitas; • Berkolaborasi dengan organisasi perempuan dan KPU untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan politik perempuan; • Mendorong partai politik agar mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif secara proporsional dan kompetitif.
	Penguatan sistem manajemen kinerja dan tata kelola internal yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital		• Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN; • Penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbasis kinerja; • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan dan pengelolaan anggaran; • Mendorong budaya kerja kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Sumber: Hasil Analisis, 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama lima tahun yang akan datang.

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika



dan Sejarah Kebangsaan;

- d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- e. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;
- f. Pembentukan Paskibraka;
- g. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;



3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah



- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- e. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

4.2 Uraian Keterkaitan NSPK,Sasaran RPJMD,Tujuan,Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang dipilih guna mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta.



Tabel 4.1
Keterkaitan NSPK. Sasaran RPJMD, Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Sasaran RPJMD ke-7: Meningkatnya ketahanan pangan dan ketahanan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan.	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Sasaran 1: Menguatnya harmoni keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat			Indeks Harmoni	
					Jumlah kejadian konflik SARA	
			Meningkatnya pemahaman, sikap dan partisipasi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai pancasila dan memperkuat karakter kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari		Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				Meningkatnya jumlah fasilitasi penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan fasilitasi penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang difasilitasi	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
						Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
						Pembentukan Paskibraka
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat		Persentase Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terlaksananya penyuluhan P4GN dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama kepada kelompok masyarakat	Cakupan kelompok masyarakat yg mendapat penyuluhan P4GN	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
					Cakupan kelompok masyarakat yang memperoleh Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial		Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
				Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat	Persentase kelompok sasaran (Pemerintah dan masyarakat) yang mendapat pembinaan kewaspadaan dini	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota
		Sasaran 2: Menguatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara			Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	
			Meningkatnya Ketaatan dan Ketertiban Administrasi Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
				Meningkatnya jumlah	Persentase	Kegiatan: Perumusan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Ormas yang dibina dan mendapatkan pengawasan	Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi dibidang



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik kader partai politik dan masyarakat		Persentase Pendidikan Politik pada kader Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
						Kegiatan :



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terpenuhinya kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat	Persentase kegiatan pendidikan politik pada masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
						Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
						Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Sasaran 3: Meningkatnya efektivitas tata kelola organisasi			Indeks Kematangan Organisasi	
			Meningkatnya		Nilai AKIP	Program



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Perangkat Daerah	kualitas perencanaan akuntabilitas dan pelayanan organisasi Perangkat Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Indeks Pelayanan Publik	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	
					Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terbayarnya gaji tunjangan ASN beserta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	Persentase tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku) Persentase tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku)	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
				Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian PD	Persentase terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sarana prasarana aparatur	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang urusan pemerintah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Pengadaan Mebel
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Pemeliharaan Mebel
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Tabel 4.2
Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029

PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	NA	NA	20	1.051.246.010	40	1.093.295.850	60	1.37.027.684	80	1.182.508.791	100	1.229.809.144	100	5.693.887.479
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan fasilitasi penguatan ideologo pancasila dan karakter kebangsaan yang difasilitasi	persen	NA	NA	20		40		60		80		100		100	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	0	1	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.243.200	1	58.492.928	5	270.816.128
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	NA	200	200	100.000.000	200	104.000.000	200	108.160.000	200	112.486.400	200	116.985.856	1.000	541.623.256



Pemerintah Kota Surakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	48		100	141.243.850	100	146.893.604	100	152.769.348	100	158.880.122	100	165.235.327	500	765.022.251
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	0	1	1	10.000.000	1	10.400.000	1	10.816.000	1	11.248.640	1	11.698.586	5	54.163.226
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	2	2	2	326.725.360	2	339.794.374	2	353.386.149	2	367.521.599	2	382.222.459	10	1.769.649.937
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	38	38	38	373.276.800	38	388.207.872	38	403.736.187	38	419.885.634	38	436.681.060	190	2.021.787.553
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	0	38	38	50.000.000	38	52.000.000	38	54.080.000	38	56.243.200	38	58.492.928	190	270.816.128
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader politik partai politik	persen	N/A	N/A	100	1.304.021.648	100	1.356.182.514	100	1.410.429.815	100	1.466.847.007	100	1.525.520.887	100	7.063.001.871



PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik pada masyarakat	peresen	N/A	50	50	1.304.021.648	50	1.356.182.514	50	1.410.429.815	50	1.466.847.007	50	1.525.520.887	50	7.063.001.871
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	dokumen	N/A	4	4	50.000.000	4	52.000.000	4	54.080.000	4	56.243.200	4	58.492.928	20	270.816.128



PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	31	18	18	100.000.000	18	104.000.000	18	108.160.000	18	112.486.400	18	116.985.856	90	541.632.256
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	962	555	555	1.136.523.648	555	1.181.984.594	555	1.229.263.978	555	1.278.434.537	555	1.329.571.918	2.775	6.155.778.675



PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	2	2	2	17.498.000	2	18.197.920	2	18.925.837	2	19.682.870	2	20.470.185	10	94.774.812
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	77,55	81,00	84,00	201.497.200	87,50	209.557.088	91,50	217.939.371	96,00	226.656.946	100	235.723.225	100	1.091.373.830
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kegiatan pendidikan politik pada masyarakat	persen	N/A	50	57,15	201.497.200	58,35	209.557.088	58,85	217.939.371	60,35	226.656.946	61,53	235.723.225	61,53	1.091.373.830
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	0	2	2	50.000.000	2	52.000.000	2	54.080.000	2	56.243.200	2	58.492.928	10	270.816.128



PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	617	350	361	66.617.200	369	69.281.888	374	72.053.163	391	74.935.290	410	77.932.702	1.901	360.820.243
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	310	270	278	74.880.000	289	77.875.200	292	80.990.208	307	84.229.816	314	87.599.009	1.480	405.574.233
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporam	12	12	12	10.000.000	12	10.400.000	12	10.816.000	12	11.248.640	12	11.698.586	60	54.163.226
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Falitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beraagam dan	%	N/A	100	100	575.712.960	100	598.741.479	100	622.691.137	100	647.598.783	100	673.502.735	100	3.118.247.094



Pemerintah Kota Surakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penghayat di Daerah yang dilaksanakan															
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan kelompok masyarakat yg mendapat penyuluhan P4GN	Persen	N/A	N/A	20	575.712.960	40	598.741.479	60	622.691.137	80	647.598.783	100	673.502.735	100	3.118.247.094
	Cakupan kelompok masyarakat yang memperoleh Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	persen	N/A	N/A	20		40		60		80		100		100	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	2	2	50.000.000	2	52.000.000	2	54.080.000	2	56.243.200	2	58.492.928	10	270.816.128
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	NA	200	200	100.000.000	200	104.000.000	200	108.160.000	200	112.486.400	200	116.985.856	1.000	541.632.256



PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	NA	80	80	415.712.960	80	432.341.479	80	449.635.137	80	467.620.543	80	486.325.365	400	2.251.635.484
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Laporan	1	1	1	10.000.000	1	10.400.000	1	10.816.000	1	11.248.640	1	11.698.586	5	54.163.226
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	N/A	N/A	80	831.811.920	85	865.084.397	90	899.687.772	95	935.675.284	100	973.102.295	100	4.505.361.668
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kelompok sasaran (Pemerintah dan masyarakat) yang mendapat pembinaan kewaspadaan dini	persen	N/A	N/A	20	831.811.920	40	865.084.397	60	899.687.772	80	935.675.284	100	973.102.295	100	4.505.361.668



PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.243.200	1	58.492.928	5	270.816.128
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	400	100	100	100.000.000	100	104.000.000	100	108.160.00	100	112.486.400	100	116.985.856	500	541.632.256



Pemerintah Kota Surakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	200	50	50	135.884.320	50	141.319.693	50	146.972.480	50	152.851.380	50	158.965.435.435	250	735.993.308
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewspadaan Perbatasan antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadanan serta Penanganan Konflik Sosial	Laporan	3	3	3	10.000.000	3	10.400.000	3	10.816.000	3	11.248.640	3	11.698.586	15	54.163.226
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	6	6	6	535.927.600	6	557.364.704	6	579.659.292	6	602.845.664	6	626.959.490	30	2.902.756.750
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Nilai		67,80	68,30	5.911.601.869	68,60	6.148.065.944	69,00	6.393.988.579	69,80	6.649.748.124	70,00	6.915.738.046	70,00	32.019.142.562
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai		4	4,1		4,2		4,3		4,4		4,5		4,5	



Pemerintah Kota Surakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		88,59	88,89		88,95		90,20		90,80		91,00		91,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	persen	100	100	100	130.857.280	100	136.091.571	100	141.535.233	100	147.196.644	100	153.084.508	100	708.765.236
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	6	7	6	111.987.200	6	116.466.688	6	121.125.355	6	125.970.370	7	131.009.184	3131.009.184	606.558.797
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	1	2.000.000	1	2.080.000	1	2.163.200	1	2.249.728	1	2.339.717	5	10.832.645
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	2.000.000	1	2.080.000	1	2.163.200	1	2.249.728	1	2.339.717	5	10.832.645
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	1	1	2.000.000	1	2.080.000	1	2.163.200	1	2.249.728	1	2.339.717	5	10.832.645
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	2.000.000	1	2.080.000	1	2.163.200	1	2.249.728	1	2.339.717	5	10.832.645



Pemerintah Kota Surakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	16	5.304.000	16	5.516.160	16	5.736.806	16	5.966.279	16	6.204.930	80	28.728.175
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	8	5.566.080	8	5.788.723	8	6.020.272	8	6.261.083	8	6.511.526	40	30.147.684
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku)	Persen	100	100	100	4.600.838.222	100	4.784.871.751	100	4.976.266.621	100	5.175.317.286	100	5.382.329.977	100	24.919.623.857
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	43	43	43	4.596.838.222	43	4.780.711.751	43	4.971.940.221	43	5.170.817.830	43	5.377.650.543	215	24.897.958.567
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Laporan	12	12	12	4.000.000	12	4.160.000	12	4.326.400	12	4.499.456	12	4.679.434	60	21.665.290
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	100	100	84.973.980	100	88.372.939	100	91.907.857	100	95.584.171	100	99.407.538	100	460.246.485
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	5	7	84.973.980	7	84.973.980	7	91.907.857	7	95.584.171	7	99.407.538	35	460.246.485
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan	persen	100	100	100	421.846.259	100	438.720.109	100	456.268.913	100	474.519.669	100	493.500.456	100	2.284.855.406



Pemerintah Kota Surakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	administrasi perkantoran															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	4.362.384	1	4.536.879	1	4.718.354	1	4.907.089	1	5.103.372	5	23.628.078
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	152.180.184	6	158.267.391	6	164.598.087	6	171.182.010	6	178.029.291	30	824.256.963
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediaka	Paket	12	12	12	31.720.000	12	32.988.800	12	34.308.352	12	35.680.686	12	37.107.913	60	171.805.751
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	4.293.120	12	4.464.845	12	4.643.439	12	4.829.176	12	5.022.343	60	23.252.923
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	33.246.720	12	34.576.589	12	35.959.652	12	37.398.038	12	38.893.960	60	180.074.959
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	186.043.851	12	193.485.605	12	201.225.029	12	209.274.030	12	217.644.991	60	1.007.673.506
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	2	10.000.000	2	10.400.000	2	10.816.000	2	11.248.640	2	11.698.586	10	54.163.226
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sarana prasarana aparatur	persen	100	100	100	427.357.632	100	444.451.938	100	462.230.014	100	480.719.215	100	499.947.983	100	2.314.706.782
Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	4.670.016	12	4.856.817	12	5.051.089	12	5.253.133	12	5.463.258	60	25.294.313



Pemerintah Kota Surakarta
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE DATA		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
			2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	6	6	6	88.431.200	6	91.968.448	6	95.647.186	6	99.473.073	6	103.451.996	30	478.971.903
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	12	334.256.416	12	347.626.673	12	361.531.739	12	375.993.009	12	391.032.729	60	1.810.440.566
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	26.000.000	100	27.040.000	100	28.121.600	100	29.246.464	100	30.416.323	100	140.824.387
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	1	1	6	26.000.000	6	27.040.000	6	28.121.600	6	29.246.464	6	30.416.323	30	140.824.387
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana aparatur	persen	100	100	100	219.728.496	100	228.517.636	100	237.658.341	100	247.164.675	100	257.051.261	100	1.190.120.409
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	11	193.814.400	11	201.566.976	11	209.629.655	11	218.014.841	23	226.735.435	23	1.049.761.307
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	1	10	10	5.223.296	10	5.432.228	10	5.649.517	10	5.875.498	10	6.110.517	50	28.291.056
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	1	20.690.800	1	21.518.432	1	22.379.169	1	23.274.336	1	24.205.309	5	112.068.046



4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Guna mendukung ketercapaian program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025-2020 berikut daftar sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan Kota Surakarta Tahun 2025-2029.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	• Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya • Sub Kegiatan a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Asta Cita Surakarta merupakan turunan sasaran dari Visi Misi yang telah diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode tahun 2025-2030. Keterkaitan Kewenangan Badan Kesbangpol Kota Surakarta yang mendukung Asta Cita Kota Surakarta pada Program ke- 7 yaitu, Program Surakarta *Smart City* pada kelompok ke-4 dengan nomenklatur Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Implementasi dari Surakarta *Smart City* adalah penggunaan hotspot CCTV yang tersebar di seluruh Kota Surakarta. Penggunaan CCTV dalam pemantauan kegiatan aktivitas agar meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga masyarakat untuk mewujudkan *zero blankspot* di Kota Surakarta.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Surakarta

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak memiliki Indikator kinerja kunci. Adapun IKU yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Harmoni	%	n/a	n/a	5,60	5,70	5,80	5,90	6,00

Berdasarkan surat dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor : 400.4.7/e-170/Polpum tanggal 25 Februari 2025 perihal Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHA) Tahun 2025. Merujuk pada surat tersebut bahwa pengukuran indeks atas dimensi, variabel dan indikator dengan menggunakan *e- Survey Riset Publik* yang dilaksanakan dari tanggal 3 Maret sampai dengan 24 Maret 2025, untuk mendapatkan hasil pengisian pada link harus memenuhi target responden yang ditetapkan. Untuk pengukuran di Kota Surakarta belum memenuhi target responden yang di tetapkan dari 1.400 target responden baru



terpenuhi 1.222 responden sehingga indeks Harmoni pada tahun 2025 hasilnya tidak bisa dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025–2029 merupakan turunan dari Visi dan Misi Wali kota dan Wakil Wali kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025–2029, dengan visi pembangunan daerah yaitu ***“Gotong Royong mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”***. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya visi dan misi kepala daerah secara efektif dan terukur.

5.2 Kesimpulan sesuai Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta adalah dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta. Dokumen ini digunakan untuk pengajuan pendanaan melalui RAPBD periode 2025-2029, dengan tahun 2030 berfungsi sebagai masa transisi agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
2. Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dijadikan pedoman untuk menetapkan perjanjian kinerja serta menyusun laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta pada periode 2025–2029.
3. Bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan mendukung pencapaian target-target indikator kinerja pada dokumen



Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dengan sebaik-baiknya.

4. Jika terdapat perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta di Kota Surakarta, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025–2029 dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Masa berlaku Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2030.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta, sekaligus menjamin tercapainya target Indikator Kinerja pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Tahun 2025–2029 dan tahun 2030 sebagai masa transisi, diperlukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil dari program dan kegiatan yang dijalankan.

Pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi Renstra dilakukan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta. Dalam pelaksanaannya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkungan instansi, yang bekerja secara kolektif untuk memastikan program-program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Dokumen ini juga bersifat dinamis, memungkinkan adanya revisi dan penyempurnaan guna mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin muncul dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Renstra tidak



hanya menjadi panduan kerja tetapi juga alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Semua target yang telah dirumuskan dalam Renstra ini dapat tercapai dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, Kolaborasi lintas sektor dengan unsur pentahelix menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, dokumen renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh dalam penyusunan perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta. Dengan arahan dan tujuan yang jelas, renstra ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirancang demi kemajuan Kota Surakarta.



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2025 – 2029

Kode Perangkat Daerah : 8.01.0.00.0.00.01.0000
Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM																			
				Indeks Harmoni Indonesia	NA	5,6	9.875.891.607	5,7	10.270.927.272	5,8	10.681.764.358	5,9	11.109.034.935	6,0	11.553.396.332	6,0	53.491.014.504	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Menguatnya Harmoni Keberagaman dalam Kehidupan Bermasyarakat																		
				Jumlah Kejadian Konflik SARA	NA	0	2.458.770.890	0	2.557.121.726	0	2.659.406.593	0	2.765.782.858	0	2.876.414.174	0	13.317.496.241	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN																
				Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	NA	20 %	1.051.246.010	40 %	1.093.295.850	60 %	1.137.027.684	80 %	1.182.508.791	100 %	1.229.809.144	100 %	5.693.887.479	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Cakupan fasilitasi penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang difasilitasi	NA	20 %	1.051.246.010	40 %	1.093.295.850	60 %	1.137.027.684	80 %	1.182.508.791	100 %	1.229.809.144	100 %	5.693.887.479	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
				Jumlah Kebijakan Teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	NA	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	54.080.000	1 dokumen	56.243.200	1 dokumen	58.492.928	5 dokumen	270.816.128	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	NA	200 orang	100.000.000	200 orang	104.000.000	200 orang	108.160.000	200 orang	112.486.400	200 orang	116.985.856	1.000 orang	541.632.256	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
				Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	NA	100 orang	141.243.850	100 orang	146.893.604	100 orang	152.769.348	100 orang	158.880.122	100 orang	165.235.327	500 orang	765.022.251	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	NA	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.400.000	1 laporan	10.816.000	1 laporan	11.248.640	1 laporan	11.698.586	5 laporan	54.163.226	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																
				Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	NA	2 dokumen	326.725.360	2 dokumen	339.794.374	2 dokumen	353.386.149	2 dokumen	367.521.595	2 dokumen	382.222.459	10 dokumen	1.769.649.937	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																
				Jumlah Paskibraka	NA	38 orang	373.276.800	38 orang	388.207.872	38 orang	403.736.187	38 orang	419.885.634	38 orang	436.681.060	190 orang	2.021.787.553	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.2.01	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		.00011																	
				Jumlah Purna Paskibraka Duta Pancasila	NA	38 orang	50.000.000	38 orang	52.000.000	38 orang	54.080.000	38 orang	56.243.200	38 orang	58.492.928	190 orang	270.816.128	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA																
				Persentase Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	NA	100 %	575.712.960	100 %	598.741.479	100 %	622.691.137	100 %	647.598.783	100 %	673.502.735	100 %	3.118.247.094	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																
				Cakupan kelompok masyarakat yg mendapat penyuluhan P4GN	NA	20 %	575.712.960	40 %	598.741.479	60 %	622.691.137	80 %	647.598.783	100 %	673.502.735	100 %	3.118.247.094	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Cakupan kelompok masyarakat yang memperoleh Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	NA	20 %		40 %		60 %		80 %		100 %		100 %			
		8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
				Jumlah Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	NA	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	52.000.000	2 dokumen	54.080.000	2 dokumen	56.243.200	2 dokumen	58.492.928	10 dokumen	270.816.128	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	NA	200 orang	100.000.000	200 orang	104.000.000	200 orang	108.160.000	200 orang	112.486.400	200 orang	116.985.856	1.000 orang	541.632.256	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																
				Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	NA	80 orang	415.712.960	80 orang	432.341.479	80 orang	449.635.137	80 orang	467.620.543	80 orang	486.325.365	400 orang	2.251.635.484	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah																
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	NA	1 laporan	10.000.000	1 laporan	10.400.000	1 laporan	10.816.000	1 laporan	11.248.640	1 laporan	11.698.586	5 laporan	54.163.226	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																
				Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	NA	80 %	831.811.920	85 %	865.084.397	90 %	899.687.772	95 %	935.675.284	100 %	973.102.295	100 %	4.505.361.668	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase kelompok sasaran (Pemerintah dan masyarakat) yang mendapat pembinaan kewaspadaan dini	NA	20 %	831.811.920	40 %	865.084.397	60 %	899.687.772	80 %	935.675.284	100 %	973.102.295	100 %	4.505.361.668	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
				Jumlah Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewspadaan Perbatasan antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadanan serta Penanganan Konflik Sosial	NA	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	54.080.000	1 dokumen	56.243.200	1 dokumen	58.492.928	5 dokumen	270.816.128	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewspadaan Perbatasan antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadanan serta Penanganan Konflik Sosial	NA	100 orang	100.000.000	100 orang	104.000.000	100 orang	108.160.000	100 orang	112.486.400	100 orang	116.985.856	500 orang	541.632.256	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewspadaan Perbatasan antar Negara , Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial	NA	50 orang	135.884.320	50 orang	141.319.693	50 orang	146.972.480	50 orang	152.851.380	50 orang	158.965.435	250 orang	735.993.308	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewspadaan Perbatasan antar Negara , Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadanan serta Penanganan Konflik Sosial	NA	3 laporan	10.000.000	3 laporan	10.400.000	3 laporan	10.816.000	3 laporan	11.248.640	3 laporan	11.698.586	15 laporan	54.163.226	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota																
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	NA	6 dokumen	535.927.600	6 dokumen	557.364.704	6 dokumen	579.659.292	6 dokumen	602.845.664	6 dokumen	626.959.490	30 dokumen	2.902.756.750	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Menguatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis																		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Tingkat Partisipasi masyarakat dalam bidang politik	NA	70 %	1.505.518.848	70 %	1.565.739.602	70 %	1.628.369.186	70 %	1.693.503.953	70 %	1.761.244.112	70 %	8.154.375.701	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																
				Persentase Pendidikan Politik pada kader Partai Politik	NA	100 %	1.304.021.648	100 %	1.356.182.514	100 %	1.410.429.815	100 %	1.466.847.007	100 %	1.525.520.887	100 %	7.063.001.871	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																
				Persentase kegiatan pendidikan politik pada masyarakat	NA	50 %	1.304.021.648	50 %	1.356.182.514	50 %	1.410.429.815	50 %	1.466.847.007	50 %	1.525.520.887	50 %	7.063.001.871	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Kebijakan Teknis di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	NA	4 dokum en	50.000.000	4 dokum en	52.000.000	4 dokum en	54.080.00 0	4 dokum en	56.243.200	4 dokum en	58.492.928	20 dokumen	270.816.12 8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	NA	18 orang	100.000.000	18 orang	104.000.000	18 orang	108.160.000	18 orang	112.486.400	18 orang	116.985.856	90 orang	541.632.256	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	NA	555 orang	1.136.523.648	555 orang	1.181.984.594	555 orang	1.229.263.978	555 orang	1.278.434.537	555 orang	1.329.571.918	2.775 orang	6.155.778.675	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	NA	2 laporan	17.498.000	2 laporan	18.197.920	2 laporan	18.925.837	2 laporan	19.682.870	2 laporan	20.470.185	10 laporan	94.774.812	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		08:01:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	NA	84 %	201.497.200	87,50 %	209.557.088	91,50 %	217.939.371	96 %	226.656.946	100 %	235.723.225	100 %	1.091.373.830	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase Ormas yang dibina dan mendapatkan pengawasan	NA	57,15 %	201.497.200	58,35 %	209.557.088	58,85 %	217.939.371	60,35 %	226.656.946	61,53 %	235.723.225	61,53 %	1.091.373.830	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
				Jumlah Kebijakan Teknis di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	52.000.000	2 dokumen	54.080.000	2 dokumen	56.243.200	2 dokumen	58.492.928	10 dokumen	270.816.128	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
				Jumlah Orang yang mengikuti Kebijakan di Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	361 orang	66.617.200	369 orang	69.281.888	374 orang	72.053.163	391 orang	74.935.290	410 orang	77.932.702	410 orang	360.820.243	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
				Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	278 orang	74.880.000	289 orang	77.875.200	292 orang	80.990.208	307 orang	84.229.816	314 orang	87.599.009	314 orang	405.574.233	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	12 laporan	10.000.000	12 laporan	10.400.000	12 laporan	10.816.000	12 laporan	11.248.640	12 laporan	11.698.586	60 laporan	54.163.226	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Meningkatnya efektivitas tata kelola organisasi Perangkat Daerah																		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Indeks Kematangan Organisasi	NA	41	5.911.601.869	42	6.148.065.944	43	6.393.988.579	44	6.649.748.124	45	6.915.738.046	45	32.019.142.562	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																
				Nilai Sakip	NA	68,30	5.911.601.869	68,60	6.148.065.944	69,00	6.393.988.579	69,80	6.649.748.124	70,00	6.915.738.046	70,00	32.019.142.562	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Indeks Pelayanan Publik	NA	4,1		4,2		4,3		4,4		4,5					
				Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	88,89		88,95		90,20		90,80		91,000					
		X.X.X.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
				Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	130.857.280	100 %	136.091.571	100 %	141.535.233	100 %	147.196.644	100 %	153.084.508	100 %	708.765.236	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	6 dokumen	111.987.200	6 dokumen	116.466.688	6 dokumen	121.125.355	6 dokumen	125.970.370	7 dokumen	131.009.184	31 dokumen	606.558.797	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.X.X.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD																
				Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	NA	1 dokum en	2.000.000	1 dokum en	2.080.000	1 dokum en	2.163.200	1 dokum en	2.249.728	1 dokum en	2.339.717	5 dokumen	10.832.645	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD																
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	1 dokum en	2.000.000	1 dokum en	2.080.000	1 dokum en	2.163.200	1 dokum en	2.249.728	1 dokum en	2.339.717	5 dokumen	10.832.645	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
				Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	1 dokum en	2.000.000	1 dokum en	2.080.000	1 dokum en	2.163.200	1 dokum en	2.249.728	1 dokum en	2.339.717	5 dokumen	10.832.645	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.X.X. 01.2.0 1.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.080.000	1 dokumen	2.163.200	1 dokumen	2.249.728	1 dokumen	2.339.717	5 dokumen	10.832.645	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X. 01.2.0 1.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	16 laporan	5.304.000	16 laporan	5.516.160	16 laporan	5.736.806	16 laporan	5.966.279	16 laporan	6.204.930	80 laporan	28.728.175	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X. 01.2.0 1.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	8 laporan	5.566.080	8 laporan	5.788.723	8 laporan	6.020.272	8 laporan	6.261.083	8 laporan	6.511.526	40 laporan	30.147.684	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X. 01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Persentase tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku)	100 %	100 %	4.600.838.222	100 %	4.784.871.751	100 %	4.976.266.621	100 %	5.175.317.286	100 %	5.382.329.977	100 %	24.919.623.857	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	43 orang/bulan	4.596.838.222	518 orang/bulan	4.780.711.751	518 orang/bulan	4.971.940.221	518 orang/bulan	5.170.817.830	518 orang/bulan	5.377.650.543	2.590 orang/bulan	24.897.958.567	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	NA	12 laporan	4.000.000	12 laporan	4.160.000	12 laporan	4.326.400	12 laporan	4.499.456	12 laporan	4.679.434	60 laporan	21.665.290	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.X.X.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				Persentase terpenuhinya Dokumen Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	84.973.980	100 %	88.372.939	100 %	91.907.857	100 %	95.584.171	100 %	99.407.538	100 %	460.246.485	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai																
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	NA	7 dokum en	84.973.980	7 dokum en	88.372.939	7 dokum en	91.907.857	7 dokum en	95.584.171	7 dokum en	99.407.538	35 dokumen	460.246.485	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																
				Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	NA	100 %	421.846.259	100 %	438.720.109	100 %	456.268.913	100 %	474.519.669	100 %	493.500.456	100 %	2.284.855.406	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	NA	1 paket	4.362.384	1 paket	4.536.879	1 paket	4.718.354	1 paket	4.907.089	1 paket	5.103.372	5 paket	23.628.078	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X. 01.2.0 6.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	6 paket	152.180.184	6 paket	158.267.391	6 paket	164.598.087	6 paket	171.182.010	6 paket	178.029.291	30 paket	824.256.963	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X. 01.2.0 6.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	NA	12 paket	31.720.000	12 paket	32.988.800	12 paket	34.308.352	12 paket	35.680.686	12 paket	37.107.913	60 paket	171.805.751	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X. 01.2.0 6.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	12 dokumen	4.293.120	12 dokumen	4.464.845	12 dokumen	4.643.439	12 dokumen	4.829.176	12 dokumen	5.022.343	60 dokumen	23.252.923	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		X.X.X. 01.2.0 6.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	12 laporan	33.246.720	12 laporan	34.576.589	12 laporan	35.959.652	12 laporan	37.398.038	12 laporan	38.893.960	60 laporan	180.074.959	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X. 01.2.0 6.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	12 laporan	186.043.851	12 laporan	193.485.605	12 laporan	201.225.029	12 laporan	209.274.030	12 laporan	217.644.991	60 laporan	1.007.673.506	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X. 01.2.0 6.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.400.000	2 dokumen	10.816.000	2 dokumen	11.248.640	2 dokumen	11.698.586	10 dokumen	54.163.226	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X. 01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	26.000.000	100 %	27.040.000	100 %	28.121.600	100 %	29.246.464	100 %	30.416.323	100 %	140.824.387	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
				Jumlah Paket Mebel yang disediakan	NA	6 unit	26.000.000	6 unit	27.040.000	6 unit	28.121.600	6 unit	29.246.464	6 unit	30.416.323	30 unit	140.824.387	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				Persentase penyediaan jasa penunjang sarana prasarana aparatur	NA	100 %	427.357.632	100 %	444.451.938	100 %	462.230.014	100 %	480.719.215	100 %	499.947.983	100 %	2.314.706.782	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	12 laporan	4.670.016	12 laporan	4.856.817	12 laporan	5.051.089	12 laporan	5.253.133	12 laporan	5.463.258	60 laporan	25.294.313	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.0003																	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	6 laporan	88.431.200	6 laporan	91.968.448	6 laporan	95.647.186	6 laporan	99.473.073	6 laporan	103.451.996	30 laporan	478.971.903	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	NA	16 laporan	334.256.416	16 laporan	347.626.673	16 laporan	361.531.739	16 laporan	375.993.009	16 laporan	391.032.729	80 laporan	1.810.440.566	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
				Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	219.728.496	100 %	228.517.636	100 %	237.658.341	100 %	247.164.675	100 %	257.051.261	100 %	1.190.120.409	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	NA	11 unit	193.814.400	11 unit	201.566.976	11 unit	209.629.655	11 unit	218.014.841	11 unit	226.735.435	55 unit	1.049.761.307	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2026)		Tahun-2 (2027)		Tahun-3 (2028)		Tahun-4 (2029)		Tahun-5 (2030)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				dan dibayarkan Pajaknya															
		X.X.X. 01.2.0 9.000 5	Pemeliharaan Mebel																
				Jumlah mebel yang dipelihara	NA	10 unit	5.223.296	10 unit	5.432.228	10 unit	5.649.517	10 unit	5.875.498	10 unit	6.110.517	50 unit	28.291.056	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.X.X. 01.2.0 9.000 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	20.690.800	1 unit	21.518.432	1 unit	22.379.169	1 unit	23.274.336	1 unit	24.205.309	5 unit	112.068.046	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025–2029

TABEL FORMULASI INDIKATOR SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2025–2029

Mn n	SASARAN/OUTCOME/ OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL (REGULASI)	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Menguatnya Harmoni Keberagaman dalam Kehidupan Bermasyarakat		Jumlah Kejadian Konflik SARA	Banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. (UU No 7 th 2012 ttg Penanganan Konflik Sosial)	Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan		Negatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
a	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah proses sistematis dan berkelanjutan dalam menanamkan, menginternalisasikan, serta membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat guna membangun kesadaran, sikap, serta perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan = (Penanaman Nilai) + (Internalisasi) + (Pembudayaan) Penjelasan : - Penanaman Nilai : Proses menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara - Internalisasi : Upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari kesadaran individu dan kelompok pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman - Pembudayaan : Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bagian dari budaya masyarakat	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya jumlah fasilitasi penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan fasilitasi penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang difasilitasi		(Jumlah fasilitasi penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yg dilaksanakan)/(jumlah fasilitasi yang direncanakan)x100%	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan	Persentase Kebijakan = Jumlah Kebijakan yang dilaksanakan dibagi total kebijakan yang direncanakan dikali 100 %	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mn n	SASARAN/OUTCOME/ OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL (REGULASI)	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	proporsi kebijakan yang telah diimplementasikan dalam bidang-bidang tersebut dibandingkan dengan jumlah total kebijakan yang direncanakan dalam periode tertentu di suatu daerah.				
	Terlaksananya penyuluhan P4GN dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama kepada kelompok masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan kelompok masyarakat yg mendapat penyuluhan P4GN		(Jumlah kelompok masyarakat yg mendapatkan penyuluhan P4GN)/ (Jumlah kelompok sasaran)x100%	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Cakupan kelompok masyarakat yang memperoleh Pembinaan Kerukunan Umat Beragama		(Jumlah kelompok masyarakat yg mendapatkan penyuluhan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama)/ (Jumlah kelompok sasaran)x100%	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
c	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi konflik sosial yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi, negosiasi, intervensi pemerintah, atau upaya hukum dibandingkan dengan total konflik sosial yang terjadi dalam suatu periode tertentu.	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan = Jumlah konflik yang telah diselesaikan dibagi Total konflik yang terjadi dikali 100% Penjelasan : Jumlah konflik yang telah diselesaikan : konflik yang telah mendapatkan penyelesaian dengan mekanisme hukum, mediasi, rekonsiliasi atau pendekatan lainnya sehingga tidak lagi menimbulkan ketegangan di mayarakat Total konflik yang terjadi : semua insiden konflik sosial yang tercatat dalam periode tertentu, baik yang sedang dalam proses penanganan maupun yang telah diselesaikan	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya kewaspadaan dini di masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kelompok sasaran (Pemerintah dan masyarakat) yang mendapat pembinaan kewaspadaan dini		(Jumlah kelompok masyarakat yg mendapatkan pembinaan kewaspadaan dini)/ (Jumlah kelompok sasaran masyarakat)x100%	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Menguatnya kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis		Tingkat Partisipasi masyarakat dalam bidang politik		(Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pilkada)/(Jumlah pemilih terdaftar) x 100%.	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mn n	SASARAN/OUTCOME/ OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL (REGULASI)	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
a	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada kader Partai Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi kader partai politik yang telah mengikuti program pendidikan politik dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah total kader yang ada. Pendidikan politik mencakup peningkatan pemahaman kader terhadap ideologi partai, sistem demokrasi, regulasi politik, serta peran dan fungsi mereka dalam kehidupan politik dan pemerintahan.	Persentase Pendidikan Politik : Jumlah Kader yg mengikuti pendidikan politik dibagi Total Kader terdaftar dikali 100 % Penjelasan : Jumlah kader yg mengikuti pendidikan politik : kader partai politik yang telah mengikuti program pendidikan politik dalam periode tertentu Total kader terdaftar : seluruh kader partai politik yang terdaftar secara resmi dalam partai	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terpenuhinya kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik pada masyarakat		(Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan dlm 1 th) /(Jumlah kegiatan pendidikan politik yg direncanakan selama 5 tahun)x100%	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang secara aktif menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasinya dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah total ormas yang terdaftar.	Persentase Ormas aktif = Jumlah Ormas yang Aktif dibagi Jumlah Total Ormas yang Terdaftar dikali 100% Penjelasan : Jumlah ormas yang aktif : ormas yang memenuhi kriteria keaktifan dalam periode tertentu Total Ormas terdaftar : Ormas yang telah memperoleh ijin dan terdaftar pada instansi pemerintah terkait	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina dan mendapatkan pengawasan		(Jumlah ormas yang dibina dan mendapatkan pengawasan) dibagi (jumlah ormas) dikali 100%	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Meningkatnya efektivitas tata kelola organisasi Perangkat Daerah		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi adalah ukuran kualitas, serta kematangan atau kedewasaan dari sistem kelembagaan yang mencakup 11 variabel penilaian yaitu: perencanaan, monitoring dan	$KOD = \frac{TNPD}{JPD} \times 100\%$ KOD = Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mn n	SASARAN/OUTCOME/ OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL (REGULASI)	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen risiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan dan budaya organisasi.	TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018			
a	Meningkatnya kualitas akuntabilitas dan pelayanan organisasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP		Nilai AKIP : Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh APIP Terdiri dari 4 komponen: - Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) - Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) - Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%) Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.	Indeks Pelayanan Publik : Nilai indeks F02 : $\sum (\text{nilai aspek } n \times \text{bobot aspek } n) \times 75\%$ Nilai indeks F03 : $\sum (\text{nilai aspek } n \times \text{bobot aspek } n) \times 25\%$ Nilai Indek Gabungan : Nilai Indeks F02 + F03 Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20.1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.	Nilai	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat : Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang dikali 25 Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mn n	SASARAN/OUTCOME/ OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL (REGULASI)	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Terusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang di susun di kali 100	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terpenuhinya gaji tunjangan ASN beserta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku)		Jumlah laporan keuangan yang disusun dibagi jumlah laporan keuangan yang harus di susun di kali 100	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang harus di susun di kali 100	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi kantor yang dipenuhi dibagi kebutuhan dikali 100	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang urusan pemerintah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		Jumlah BMD yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan BMD dikali 100	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sarana prasarana aparatur		Jumlah penunjang sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dibagi Jumlah penunjang sarpras aparatur yang harus disediakan dikali 100	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana aparatur		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana dikali 100	%	Non Kumulatif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Perangkat Daerah,



Drs. Agus Santosa, MM

NIP. 19670226 199303 1 005

Cascade Indikator Program-Kegiatan

Indikator Program	Kode & Nomenklatur Kegiatan		Indikator Kegiatan	Formulasi
Nilai AKIP	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang di susun di kali 100
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku)	Jumlah laporan keuangan yang disusun dibagi jumlah laporan keuangan yang harus di susun di kali 100
Indeks Pelayanan Publik	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang harus di susun di kali 100
Indeks Kepuasan Masyarakat	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi kantor yang dipenuhi dibagi kebutuhan dikali 100
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Jumlah BMD yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan BMD dikali 100
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sarana prasarana aparatur	Jumlah penunjang sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dibagi Jumlah penunjang sarpras aparatur yang harus disediakan dikali 100
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana dikali 100
Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan fasilitasi penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang difasilitasi	(Jumlah fasilitasi penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yg dilaksanakan)/(jumlah fasilitasi yang direncanakan)x100%
Persentase Pendidikan Politik pada kader Partai Politik	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan pendidikan politik pada masyarakat	(Jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan dlm 1 th) /(Jumlah kegiatan pendidikan politik yg direncanakan selama 5 tahun)x100%
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina dan mendapatkan pengawasan	(Jumlah ormas yang dibina dan mendapatkan pengawasan) dibagi (jumlah ormas) dikali 100%
Persentase Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan kelompok masyarakat yg mendapat penyuluhan P4GN	(Jumlah kelompok masyarakat yg mendapatkan penyuluhan P4GN)/ (Jumlah kelompok sasaran)x100%
			Cakupan kelompok masyarakat yang memperoleh Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	(Jumlah kelompok masyarakat yg mendapatkan penyuluhan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama)/ (Jumlah kelompok sasaran)x100%

Indikator Program	Kode & Nomenklatur Kegiatan		Indikator Kegiatan	Formulasi
daerah yang dilaksanakan				
Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kelompok sasaran (Pemerintah dan masyarakat) yang mendapat pembinaan kewaspadaan dini	(Jumlah kelompok masyarakat yg mendapatkan pembinaan kewaspadaan dini)/ (Jumlah kelompok sasaran masyarakat)x100%